

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rokok merupakan hasil dari olahan tembakau terbungkus cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa tambahan. Kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok kemudian disebut dengan merokok.

Saat ini, merokok menjadi masalah serius yang dihadapi oleh negara di dunia termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Indonesia dihadapkan pada kondisi dimana dampak negatif dari rokok dirasakan oleh perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif merupakan orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar sedangkan perokok pasif adalah mereka yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain. Dampak dari kegiatan merokok ini sangat merugikan khususnya bagi perokok pasif yang ikut merasakan dampak dari perbuatan yang tidak mereka lakukan.

Data penelitian terakhir WHO (*World Health Organization*) pada tahun 2008 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke 3 pengonsumsi rokok terbesar di dunia setelah China dan India, dengan jumlah perokok 28% dari

Tabel 1.1

Negara dengan Jumlah Perokok Tertinggi di Dunia

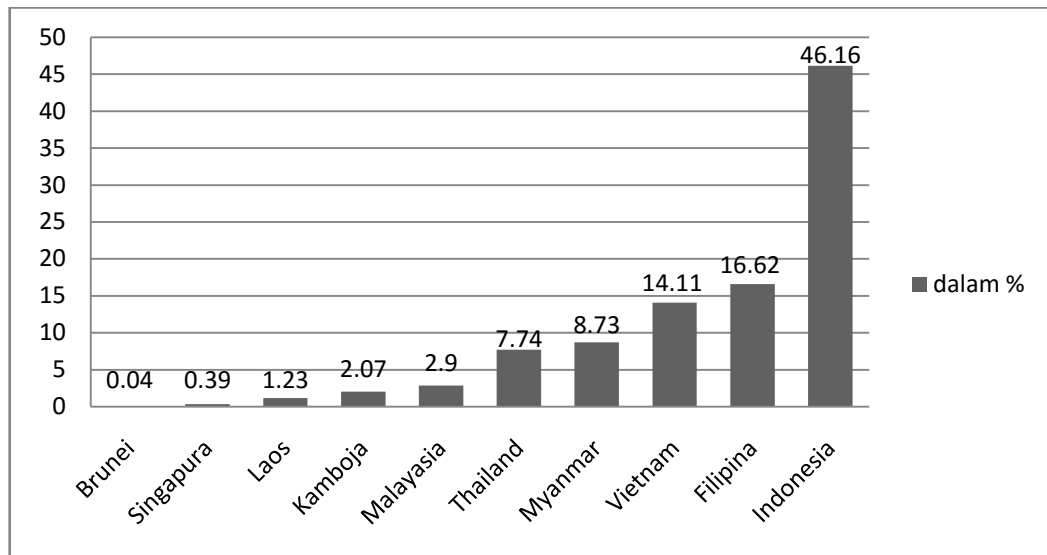
No	Negara	Jumlah Perokok
1	China	390 juta atau 29% dari total penduduk
2	India	144 juta atau 12,5% dari total penduduk
3	Indonesia	65 juta atau 28% dari total penduduk
4	Rusia	61 juta atau 43% dari total penduduk
5	Amerika Serikat	58 juta atau 19% dari total penduduk
6	Jepang	49 juta atau 38% dari total penduduk
7	Braazil	24 juta atau 12,5% dari total penduduk
8	Bangladesh	23,3 juta atau 23,5% dari total penduduk
9	Jerman	22,3 juta atau 27% dari total penduduk
10	Turki	390 juta atau 29% dari total penduduk

Sumber : databoks.katadata.co.id (WHO, 2008) diakses Oktober 2018

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa setiap 4 orang di Indonesia, terdapat seorang perokok aktif. Jumlah ini dapat dikatakan tinggi karena hampir sama dengan persentase negara dengan jumlah perokok tertinggi yakni Cina. Sementara itu di lingkup ASEAN, Indonesia menduduki peringkat teratas jumlah perokok dibanding dengan negara Asia Tenggara lainnya.

Grafik 1.1

Persentase Perokok di Negara-Negara Asia Tenggara



Sumber : databoks.katadata.co.id (Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA), 2016) diakses Oktober 2018

Jumlah perokok di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara juga menduduki posisi tertinggi. Tingginya angka perokok di Indonesia ini kemudian memunculkan berbagai permasalahan di berbagai aspek yakni aspek ekonomi, lingkungan dan terutama aspek kesehatan. Merokok tidak hanya berdampak pada orang yang merokok (perokok aktif) tetapi juga pada orang yang tidak merokok yang berada disekitar para perokok (perokok pasif) atau dikenal dengan istilah *second-hand smoker*. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif. Menurut data WHO (*World Health Organization*), kematian 6 juta orang tiap tahunnya disebabkan oleh kebiasaan merokok, termasuk di dalamnya yaitu perokok pasif sejumlah 600.000 meninggal akibat terpapar asap rokok. Jika hal ini

terus berlanjut, maka diprediksikan pada tahun 2030 akan terjadi kematian 8 juta orang tiap tahunnya, dimana 80% terjadi di negara miskin dan berkembang menurut WHO (dalam infodatin hari tanpa rokok, Kemkes.go.id).

Riset Kesehatan Dasar (2018) menemukan bahwa 85% rumah tangga di Indonesia terpapar asap rokok, estimasinya delapan perokok aktif meninggal dan satu perokok pasif meninggal. Berdasarkan perhitungan ini terdapat kurang lebih 25.000 kematian yang terjadi karena asap rokok. Dampak ekonomi terhadap keluarga perokok dapat dirasakan bahkan sebelum anggota keluarga jatuh sakit atau meninggal. Informasi yang masih didapat dari Riskesdas seorang perokok di Indonesia rata-rata menghabiskan 12 batang rokok per hari. Di tahun 2016 (Survei Sosial Ekonomi Nasional), 14% pengeluaran rakyat Indonesia dialokasikan untuk padi-padian sementara 13,8% untuk rokok. Data yang tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS), selama setidaknya sepuluh tahun terakhir, menunjukkan konsistensi bahwa pengeluaran untuk rokok mengalahkan jumlah pengeluaran untuk kebutuhan bahan pangan lain seperti telur yang bermanfaat bagi peningkatan gizi keluarga. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kesejahteraan masyarakat sebab masyarakat lebih memilih menghabiskan uang untuk rokok daripada untuk memenuhi asupan gizi harian.

Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah menghadapi beberapa masalah penyakit tidak menular yang mendominasi berdasarkan hasil Riskesda Kota Semarang pada tahun 2018. Berdasarkan laporan program dari rumah sakit dan puskesmas di

Kota Semarang menyebutkan terdapat 11.862 kasus akibat kanker dan 268 diantaranya adalah kanker bronkus dan kanker paru-paru akibat konsumsi rokok.

Melihat fenomena yang terjadi akibat konsumsi rokok di Indonesia saat ini, Pemerintah mengambil suatu kebijakan untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari dampak buruk rokok yakni dengan menentukan kawasan yang bebas dari asap rokok. Selain memberi perlindungan bagi masyarakat yang bukan perokok, kebijakan ini juga bermaksud untuk memenuhi hak perokok namun tidak mengganggu kepentingan orang lain.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115 ayat (2) mewajibkan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di daerah. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok. Peraturan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Undang-Undang no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pedoman bagi setiap daerah dalam memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tertuang dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Dilatarbelakangi keinginan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Semarang dan karena pemerintah melihat bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya dan menurunnya kondisi kesehatan masyarakat

perokok dan buakan perokok, Pemerintah Kota Semarang mencoba megimplementasikan ketentuan yang mengatur setiap Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di daerah dengan mengeluarkan produk hukum berupa Perda No.3 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Perda Kawasan Tanpa Rokok ini diikuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 29A Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Surat Keputusan Nomor 440/423/2015 tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tujuan adanya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menurut Perda Kota Semarang No.3 Tahun 2013 diantaranya yakni melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok baik secara langsung maupun tidak langsung, menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, dan melarang/menghilangkan produksi,penjualan,iklan dan/atau konsumsi rokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Perda ini juga mengatur tempat-tempat yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yakni area pelayanan kesehatan,tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, tempat kerja dan tempat lainnya. Berdasarkan aturan ini, lokus yang akan diteliti oleh penulis termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yakni tempat kerja sekaligus kantor pemerintahan yang ada di Semarang. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Balaikota Semarang sebagai salah satu kantor pemerintahan yang ada di Kota Semarang. Meskipun Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah ada sejak tahun 2013, namun pemerintah Kota Semarang mulai mencoba berkonsentrasi pada Perda ini

sejak tahun 2016 dan masih sering menemukan pelanggaran. Begitupun dengan pelaksanaan program di Balaikota sendiri masih menemukan berbagai permasalahan. Hingga saat ini berbagai kasus pelanggaran terhadap Kawasan Tanpa Rokok masih banyak ditemukan bahkan di gedung pemerintahan yakni Balaikota Semarang, dilansir dari portal beritajateng.net pada April 2016 tampak puluhan PNS Pemkot Semarang dan anggota Dewan harus menuliskan surat pernyataan bermaterai Rp 6000 karena telah melanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok.

Kepala seksi operasi dan penindakan Trantibmas Satpol PP Kota Semarang, Sudibyo menjelaskan petugas gabungan telah menindak puluhan PNS dan anggota Dewan Kota Semarang yang merokok di kawasan tanpa rokok.

“Usai rapat yang dilakukan Senin (18/4) pagi dengan beberapa instansi seperti Dinas Kesehatan, dan Kepolisian serta Humas, kami kemudian menyisir area Balaikota menindak tegas perokok aktif yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tadi kita hanya beri sanksi membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6000, akan tetapi belum ada sanksi tegas dan hanya peringatan,” ujar Sudibyo.

Sumber : beritajateng.net/2017/02/28 diakses pada Oktober 2018

Pada tahun berikutnya, Satpol PP Kota Semarang kembali melakukan penertiban Perda Kawasan Tanpa Rokok di Balaikota Semarang seperti dilansir oleh salah satu portal berita iNews.id.

Dalam penegakan Perda KTR kali ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Semarang menindak tegas 30 orang yang kedapatan tengah mengisap rokok di

lingkungan Balaikota Kamis (21/12/2017). Mereka terdiri dari warga yang datang mengurus berkas di pemkot dan sejumlah pegawai pemerintahan. Kepala Seksi Operasional Satpol PP Kota Semarang Sudibyo mengatakan, penindakan Perda KTR ini masih dilakukan secara persuasif. Pelanggar masih diberi peringatan dan wajib membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahan.

"Kesadaran masyarakat soal Perda KTR masih kurang. Padahal kami sudah sering melakukan sosialisasi dan sudah memberikan stiker larangan merokok. Pada 2018 mendatang akan langsung dikenakan sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi pelanggar Perda KTR." jelas Sudibyo.

Sementara itu, pelanggar aturan KTR ini yang merupakan salah satu warga yang mengaku tidak mengetahui ada Perda KTR yang mengatur larangan merokok di lingkungan Pemkot Semarang. Mengoptimalkan pemberlakuan Perda KTR secara bertahap, Satpol PP Semarang juga sudah menempatkan pamflet dan stiker larangan merokok di tempat-tempat tertentu, yang diatur dalam perda. Pemkot Semarang juga sudah gencar menyosialisasikan Perda KTR ini.

Sumber : www.inews.id/2017/12/21 diakses pada Oktober 2018

Tahun berikutnya, kasus yang sama terjadi di lingkungan Balaikota Semarang. Beberapa oknum didapati sedang menghisap rokok di salah satu ruangan. Masih sama dengan tahun sebelumnya, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran agar yang bersangkutan tidak mengulang kembali perbuatannya.

Seorang PNS bernama Tri Sulistyono mendatangi beberapa petugas Satpol PP Kota Semarang di Lantai V Gedung Moch Ihsan, Komplek Balaikota Semarang, Rabu (14/3/2018). Saat itu, ia bersama beberapa orang sedang asik merokok di

ruang transit dekat jendela ruangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ia pun kemudian diminta mematikan rokok yang dihisapnya.

"Tadi saya kaget didatangi Satpol PP. Terus disuruh matikan rokok dan ditanya mengenai larangan merokok. Lha saya tidak tahu kalau ada larangan itu," kata Sulistyو

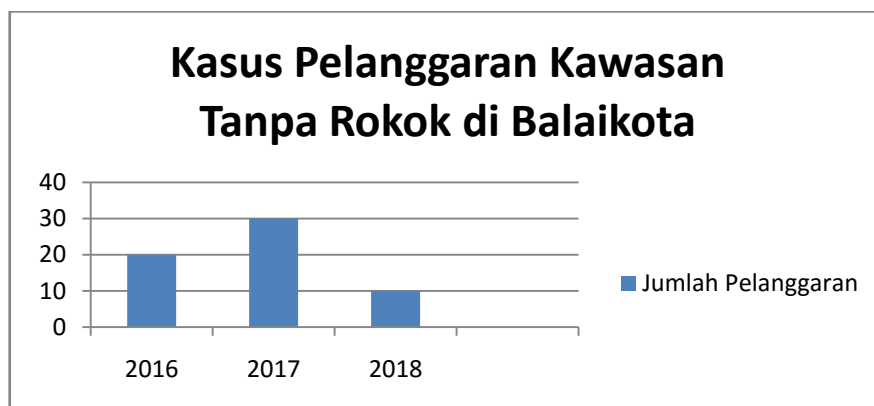
Sulistyو dikenai sanksi karena melanggar aturan tentang KTR. Hanya saja, untuk sementara sanksi yang diberikan masih berupa teguran dan membuat pernyataan tidak mengulangi lagi. Koordinator lapangan operasi Satpol PP Kota Semarang, Agus Dwi Harso mengatakan, hingga Maret 2018 ini masih banyak masyarakat yang belum mengindahkan Perda itu. Tak terkecuali para Pegawai Negeri Sipil (ASN) di lingkungan Balaikota Semarang.

"Kami menemukan 10 orang yang merokok di lingkungan kantor Balai Kota Semarang ini. Ironisnya mereka adalah Pegawai Negeri Sipil," kata Agus.

Sumber : jateng.tribunnews.com/2018/03/14 diakses pada Oktober 2018

Grafik 1.2

Grafik Pelanggran KTR di Balaikota Semarang



Sumber : diolah oleh penulis

Penerapan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok memang masih belum dapat dikatakan maksimal. Setiap daerah yang menerapkan peraturan ini menghadapi kendala yang hampir sama. Kota Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang juga menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam data Jurnal yang berjudul Studi Kualitatif Perilaku Merokok Pada Karyawan Di Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi, menyebutkan bahwa kendala dari pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di salah satu Rumah Sakit di Jambi adalah kurangnya kesadaran dari para perokok akan batasan Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan implikasi dari kurangnya sosialisasi. Para pegawai Rumah sakit yang merokok beranggapan bahwa mereka boleh merokok di Rumah Sakit jika tidak ada orang di sekitar mereka. Pengawasan yang dilakukan juga hanya mengandalkan security (pihak keamanan) Rumah Sakit untuk memantau bahwa tidak ada orang yang merokok di Rumah Sakit. Hal senada ditemukan di Kota Padang sebagaimana di sebutkan dalam jurnal yang berjudul Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) . Dalam Upaya menurunkan Perokok Aktif Di Sumatera Barat Tahun 2013. Kendala dalam pelaksanaan KTR berdasarkan penelitian ini adalah kurangnya pengawasan rutin yang dilakukan oleh dinas terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang. Hal senada ditemukan dari penelitian tentang Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (Studi Kasus SMP Negeri 21 Semarang), pelanggaran terhadap Kawasan Tanpa Rokok masih banyak ditemukan karena pengetahuan yang kurang seiring dengan sosialisasi dan pengawasan yang kurang optimal. Berdasarkan data dan

beberapa temuan peneliti terdahulu terkait masih ditemukannya pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di Balaikota Semarang, maka pertanyaan penelitian yang diambil yaitu **“Mengapa Masih Terjadi Pelanggaran Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Balaikota Semarang?”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka disusunlah rumusan masalah yang dijabarkan melalui pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Balaikota Semarang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Balaikota Semarang?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Balaikota Semarang.
2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Balaikota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian digunakan sebagai sarana menerapkan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh dalam studi di perguruan tinggi, khususnya Ilmu Administrasi Publik

2. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini di Balaikota Semarang

3. Bagi Pihak Balaikota Semarang

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi instansi terkait dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Balaikota Semarang, antara lain kepala instansi, ASN perokok aktif dan ASN bukan perokok.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Judul Penelitian	Tujuan Penelitian dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan
1	<p>Peneliti : Muhammad fahry Nasyruddin</p> <p>Judul Penelitian : Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Sekolah (Studi kualitatif pada SMPN 21 Semarang)</p> <p>Jurnal Kesehatan Masyarakat 2013, volume 2, nomor 1, Januari 2013</p>	<p>Tujuan Penelitian: Untuk melihat Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di SMPN 21 Semarang</p> <p>Metode Penelitian : Jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi peraturan kawasan tanpa rokok. Subyek penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, kepala TU, urusan kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana, dan humas.</p>	<p>Masih ditemukan pelanggaran di lokasi kawasan tanpa rokok di SMPN 21 Semarang. Hal ini terjadi karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan, 2. Sumberdaya yang kurang mendukung 3. Proses sosialisasi yang tidak optimal, 4. Belum ada SOP, 5. Komitmen sekolah yang kurang 6. Tidak adanya bimbingan dan pengawasan. 	<p>Penelitian yang akan dilakukan mengaju kepada Perda No.3 Tahun 2013 sedangkan penelitian terdahulu mengacu pada Perwal No. 12 tahun 2009</p> <p>Terdapat perbedaan lokus penelitian yang akan dilakukan.</p> <p>Penelitian yang akan dilakukan pada Balikpapan Semarang. Tidak hanya menggambarkan implementasi kebijakan tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di Balikpapan Semarang.</p>

2	<p>Peneliti : I Komang Wijana , I Nyoman Mudana</p> <p>Judul Penelitian : Pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka perlindungan terhadap perokok pasif.</p> <p>Jurnal Kerthanegara , Vol2 No.1, Januari 2014</p>	<p>Tujuan Penelitian : Mengetahui kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dlam pengaturan KTR serta pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka perlindungan terhadap perokok pasif.</p> <p>Metode Penelitian : Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris untuk mengetahui permasalahan dari segi hukum dengan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berdasarkan perilaku masyarakatdalam hubungan hidup bermasyarakat.</p>	<p>Hasil Penelitian : Pemerintah Provinsi Bali mempunyai kewenangan untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya, mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Namun dalam pelaksanaannya masih belum efektif karena masih ditemui perokok aktif yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok meskipun sudah dilakukan penindakan.</p>	<p>Terdapat perbedaan lokus penelitian dengan yang akan dilakukan.</p> <p>Terdapat perbedaan fokus dengan penelitian yang akan dilakukan. Jika penelitian ini memfokuskan terhadap perlindungan bagi perokok pasif, maka penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada evaluasi keseluruhan aspek menggunakan indikator-indikator evaluasi.</p>
3	<p>Peneliti : Christina Imelda</p> <p>Judul Penelitian: Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Guru dan</p>	<p>Tujuan Penelitian : Mengetahui Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Guru dan Siswa tentang rokok dan KTR terhadap partisipasi</p>	<p>Hasil Penelitian : Pengetahuan tentang rokok tidak berpengaruh terhadap partisipasi dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan sikap tentang</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi i implementasi kebijakan yaitu dari segi pengetahuan</p>

	<p>siswa tentang kawasan tanpa rokok terhadap partisipasi dalam penerapan kawasan tanpa rokok di SMP N 1 Kota Medan Tahun 2012</p> <p>Kebijakan Promosi Kesehatan dan Biostatik, vol.1 no.1 tahun 2012</p>	<p>dalam penerapan KTR di SMPN 1 Kota Medan tahun 2012.</p> <p>Metode Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan yakni survei tipe <i>explanatory</i>. Menjelaskan pengaruh pengetahuan rokok dan kebijakan KTR terhadap Partisipasi Penerapan KTR di SMPN 1 Kota Medan. Populasi penelitian ini merupakan guru dan siswa yang ada di SMPN 1 Medan sebesar 884 orang.</p>	<p>rokok dan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok.</p>	<p>dan sikap guru tentang Kawasan Tanpa Rokok sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan akan mengevaluasi dengan menggunakan 5 indikator evaluasi yakni efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.</p>
4.	<p>Peneliti : Nizhwardi Azka Judul Penelitian : Studi Efektivitas Kebijakan Perda Kota tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat Tahun 2013</p>	<p>Tujuan Penelitian : Melihat efektivitas kebijakan KTR dalam upaya menurunkan perokok aktif di Sumatera Barat.</p> <p>Metode Penelitian : Penelitian ini dilakukan dengan <i>mix method</i> yaitu berupa penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan <i>design explanatory</i>. Pengumpulan data dilakukan di Kota Padang, Padang</p>	<p>Hasil Penelitian : Di Padang Panjang, peraturan ini sudah berjalan karena adanya komitmen dari Walikota dan DPR. Di Kota Payakumbuh juga adanya komitmen dari Walikota dan dukungan dari Dinas Kesehatan. Di Kota Padang masih beberapa perusahaan swasta yang telah menerapkan kebijakan KTR.</p> <p>Faktor yang</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan akan mengevaluasi bagaimana kebijakan sudah berjalan di Balaikota Semarang sejak kebijakan dibuat yakni Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2013.</p>

	Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol. 2 No.4, Desember 2013	Panjang dan Payakumbuh. Data kuantitatif berjumlah 100 orang (kuesioner) sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara ke Dinas Kesehatan, Tokoh masyarakat, perokok dan FGD.	mempengaruhi pelaksanaan KTR adalah komitmen dari Kepala Daerah, DPR, Dinas Kesehatan, dan dinas terkait lainnya serta tidak lupa partisipasi masyarakat.	
5.	<p>Peneliti : Dr Quan Gan, PhD, Dr S. Katharine Hammond, PhD, Dr Yuan Jiang, MD, Dr Yan Yang, MD, and Dr Teh-wei Hu, PhD</p> <p>Judul Penelitian :</p> <p>EFFECTIVENESS OF A SMOKE-FREE POLICY IN LOWERING SECONDHAND SMOKE CONCENTRATIONS IN OFFICES IN CHINA</p>	<p>Tujuan Penelitian:</p> <p>Untuk memeriksa tingkat paparan asap rokok di gedung-gedung perkantoran Tiongkok dan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan bebas-rokok dalam mengurangi paparan asap rokok.</p> <p>Metode Penelitian:</p> <p>Survei kebijakan merokok dan pengukuran tingkat paparan asap rokok di 14 gedung kantor dari 10 provinsi di Cina.</p>	<p>Hasil Penelitian:</p> <p>Merokok di dalam gedung secara signifikan meningkatkan konsentrasi paparan asap rokok baik di kantor dengan setidaknya satu perokok dan di kantor tanpa perokok. Di sebuah gedung yang baru-baru ini mengadopsi kebijakan bebas-rokok, konsentrasi nikotin menurun secara signifikan setelah kebijakan itu diberlakukan. Pemberlakuan kebijakan merokok efektif dalam mengurangi paparan asap rokok di gedung-gedung.</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan berfokus sama yakni tempat kerja sebagai fokus dari penelitian ini. Meskipun metode yang digunakan berbeda yakni dengan melakukan penelitian deskriptif kualitatif.</p>

6.	<p>Peneliti: Greenhalgh, EM., Dan Scollo, M</p> <p>Judul Penelitian: Effectiveness Of Smokefree Legislation In Reducing Exposure To Tobacco Toxins, Improving Health, And Changing Smoking Behaviours</p>	<p>Tujuan Penelitian: Melihat efektivitas legislasi <i>Smokefree</i> terutama bertujuan untuk melindungi non-perokok dari dampak kesehatan yang berbahaya dari perokok pasif</p> <p>Metode: Tinjauan bukti paling komprehensif dan teliti diberikan oleh Badan Internasional untuk Penelitian Kanker (IARC)</p>	<p>Hasil Penelitian: Peneliti Australia menemukan bahwa undang-undang asap rokok yang lebih kuat secara independen terkait dengan - dan memainkan peran penting dalam - mengurangi prevalensi merokok antara tahun 2001 dan 2011; periode waktu di mana undang-undang tersebut menjadi sangat kuat. Undang - undang <i>Smokefree</i> mungkin juga memiliki efek tidak langsung pada prevalensi merokok melalui mendorong adopsi larangan merokok di rumah, yang pada gilirannya mengurangi merokok orang dewasa</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan akan mengevaluasi bagaimana kebijakan sudah berjalan di Balaikota Semarang sejak kebijakan dibuat yakni Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2013.</p>
7.	<p>Peneliti: Andrew W. Bergen, Neil Caporaso</p> <p>Judul Penelitian: Cigarette Smoking</p> <p><i>JNCI: Journal of the National</i></p>	<p>Tujuan Penelitian: Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk menggambarkan dan mengevaluasi faktor-faktor demografis, psikososial, dan biologis yang ditemukan untuk</p>	<p>Hasil Penelitian : Merokok saat ini di Amerika Serikat secara positif terkait dengan usia yang lebih muda, pendapatan yang lebih rendah, berkurangnya prestasi pendidikan, dan lingkungan sekitar</p>	<p>Penelitian ini spesifik akan menyoroti pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja yakni Balaikota Semarang</p>

	<p><i>Cancer Institute, Volume 91,</i></p>	<p>menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik dengan merokok saat ini dan persisten untuk membuat rekomendasi penelitian mengenai kovariat mana yang penting dalam studi fenotipe manusia dari merokok.</p> <p>Metode:</p> <p>Metode naratif digunakan untuk memberikan contoh bukti yang disajikan dalam studi yang ditinjau. Metode yang digunakan untuk membuat rekomendasi penelitian adalah mengidentifikasi fenotip yang secara konsisten dan statistik berhubungan secara signifikan dengan merokok saat ini.</p>	<p>yang kurang menguntungkan. Perokok harian merokok untuk menjaga kadar nikotin di otak, terutama untuk menghindari efek negatif dari penarikan nikotin, tetapi juga untuk memodulasi suasana hati. Perokok reguler menunjukkan tingkat stres dan rangsangan yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada perokok, serta nilai impulsif dan neuroticism yang lebih tinggi</p>	
8.	<p>Peneliti : M. S. Jaakkola, J. J. K. Jaakkola</p> <p>Judul</p>	<p>Tujuan Penelitian:</p> <p>meninjau pengalaman dengan undang-undang dan data tempat kerja bebas asap rokok nasional atau di seluruh</p>	<p>Hasil Penelitian:</p> <p>Menurut perkiraan terbaru dari Eropa dan Amerika Serikat, sejumlah besar pekerja terpapar asap rokok di tempat kerja mereka. Ada</p>	<p>Penelitian yang akan dilakukan berfokus sama yakni tempat kerja sebagai fokus dari penelitian ini. Meskipun</p>

	<p>Penelitian: Impact of smoke-free workplace legislation on exposures and health: possibilities for prevention European Respiratory Journal 2006 28: 397-</p>	<p>negara bagian tentang terjadinya paparan asap tembakau lingkungan di tempat kerja di Eropa.</p> <p>Metode Penelitian: Pencarian sistematis dari basis data Medline telah dilakukan dan sumber-sumber publikasi terbaru lainnya digunakan dari tahun 1966 sampai November 2005. Ketika menyajikan data, penulis saat ini memfokuskan pada hasil dari meta-analisis dan publikasi terbaru</p>	<p>banyak bukti bahwa paparan asap rokok di tempat kerja terkait secara kausal dengan kanker paru-paru dan PJK, dan ada bukti kuat bahwa paparan tersebut terkait dengan peningkatan risiko asma pada orang dewasa. Bukti yang relatif kuat menghubungkan paparan asap rokok dengan penyakit paru-paru kronis dan stroke. Perkiraan kasar karena paparan asap rokok di tempat kerja di Eropa dan AS menunjukkan bahwa, pada prevalensi paparan saat ini, dampak kesehatan masyarakat sangat besar. Bukti yang berkembang menyoroti perlunya melindungi pekerja terhadap paparan asap rokok di tempat kerja mereka.</p>	<p>metode yang digunakan berbeda yakni dengan melakukan penelitian deskriptif kualitatif.</p>
--	---	---	--	---

Sumber : diolah oleh penulis

Berbagai daerah di Indonesia sudah menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang bertujuan mengurangi paparan asap rokok di tempat-tempat umum. I Komang Wijana melakukan penelitian Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di Bali dalam rangka mengetahui kewenangan pemerintah serta sejauh mana implementasi Perda sudah berjalan. Penelitiannya menemukan bahwa pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Bali masih belum maksimal karena masih ditemukan pelanggaran dan minimnya penindakan.

Penelitian terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Medan yang dilakukan oleh Christina Imelda di salah satu SMP di Kota Medan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Kebijakan KTR terhadap partisipasi aktor pelaksana KTR di sekolah. Hasilnya, pengetahuan kebijakan KTR tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi dalam penerapan KTR.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti lain, di Padang Sumatera Barat, penelitian oleh Azka menunjukkan bahwa peraturan Kawasan Tanpa Rokok sudah berjalan dengan baik di Kota Padang dibuktikan dengan komitmen pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan Kota Padang dalam pelaksanaan KTR.

Kebijakan kawasan Tanpa Rokok juga sudah banyak diterapkan di berbagai negara di dunia. Di China, Dr Quan Gan, PhD dan rekan lainnya melakukan penelitian yang bertujuan untuk memeriksa tingkat paparan asap rokok

di gedung-gedung perkantoran Tiongkok dan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan bebas-rokok dalam mengurangi paparan asap rokok. Penelitian ini menemukan bahwa merokok di dalam gedung secara signifikan meningkatkan konsentrasi paparan asap rokok baik di kantor dengan setidaknya satu perokok dan di kantor tanpa perokok.

Andrew W. Bergen, Neil Caporaso melakukan penelitian di Amerika Serikat untuk melihat kaitan faktor-faktor demografis, psikososial, dan biologis dengan perilaku merokok. Hasil dari penelitian menunjukkan merokok saat ini di Amerika Serikat secara positif terkait dengan usia yang lebih muda, pendapatan yang lebih rendah, berkurangnya prestasi pendidikan, dan lingkungan sekitar yang kurang menguntungkan.

Greenhalgh, EM., Dan Scollo, M melakukan penelitian di Australia untuk Melihat efektivitas legislasi *Smokefree* terutama bertujuan untuk melindungi non-perokok dari dampak kesehatan yang berbahaya dari perokok pasif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa undang-undang asap rokok yang lebih kuat secara independen terkait dan memainkan peran penting dalam mengurangi prevalensi merokok antara tahun 2001 dan 2011. Periode waktu di mana undang-undang tersebut menjadi sangat kuat. Undang - undang *Smokefree* di Australia juga memiliki efek tidak langsung pada prevalensi merokok melalui mendorong adopsi larangan merokok di rumah, yang pada gilirannya mengurangi merokok orang dewasa.

Penelitian di Eropa tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh M. S. Jaakkola, J. J. K. Jaakkola tentang Pengaruh Adanya Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja Terhadap Kesehatan : Kemungkinan serta Pencegahannya, menemukan bahwa di Eropa, sejumlah besar pekerja terpapar asap rokok di tempat kerja mereka. Ada banyak bukti bahwa paparan asap rokok di tempat kerja terkait secara kausal dengan kanker paru-paru dan PJK, dan ada bukti kuat bahwa paparan tersebut terkait dengan peningkatan risiko asma pada orang dewasa.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu membuktikan bahwa kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sudah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia maupun negara lain di dunia. Penelitian penerapan KTR di tempat kerja yang diterapkan oleh negara lain juga menunjukkan hasil bahwa masih banyak pelanggaran KTR di tempat kerja yang menyebabkan dampak baik langsung maupun tidak langsung melalui paparan asap rokok.

Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan berfokus pada tempat kerja sekaligus gedung pemerintahan Kota Semarang yakni Balai Kota Semarang.. Evaluasi yang dilaksanakan adalah evaluasi *on-going* dikarenakan kebijakan ini masih terus berlangsung hingga kini di Balai Kota Semarang. Peneliti akan menggunakan indikator-indikator evaluasi yang sesuai sebagai alat pengukuran keberhasilan kebijakan. Selain itu, penelitian ini mencoba melihat apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini dalam mencapai tujuan yang sudah dirancang sebelumnya.

1.5.2 Administrasi dan Administrasi Publik

Administrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *administration* atau *to administear* yang berarti mengelola (*to manage*) atau menggerakkan (*to direct*). Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tata usaha seperti tulis menulis, surat menyurat. Pengertian administrasi secara luas menurut Siagian yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011:3) mengatakan: Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang di tentukan sebelumnya Gie yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011: 3) mengemukakan bahwa : Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari hari karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa bekerja sendiri serta membutuhkan orang lain dalam pencapaian tujuannya.

Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menyimpulkan administrasi sebagai suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008 :4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik di organisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan – keputusan dalam kebijakan publik serta memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah menjalankan peran sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator yang aktif dan inisiatif dalam mengatur dan mengambil langkah atau prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat.

Ruang lingkup administrasi publik meliputi beberapa dimensi strategis yaitu (Keban, 2008 :11) :

1. Dimensi Kebijakan : Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Proses tersebut dapat dianalogikan dengan sistem kerja otak manusia dengan arahan atau tujuan dari suatu tindakan.
2. Dimensi Organisasi : Berkenaan dengan pengaturan struktur dan hirarki yang meliputi pembentuk unit, pembagian tugas antar lembaga-lembaga publik, dan penetapan prosedur untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini dapat diumpamakan sebagai sistem organ tubuh manusia yang memiliki peran dan fungsi tersendiri dan siap melaksanakan tugasnya setelah mendapatkan perintah dari otak.

3. Dimensi Manajemen : Menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang dirancang sebelumnya dapat diimplementasikan (digerakkan, diorganisir, dikontrol) demi mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip tertentu.
4. Dimensi Moral atau Etika : Menjadi salah satu dimensi penting dalam administrasi publik karena setiap kegiatan administrasi publik berkenaan dengan maksud dan tujuan publik tertentu, diarahkan untuk memuaskan kepentingan publik dan dijalankan dengan kewajiban dan motif yang benar.
5. Dimensi Lingkungan : Dinamika atau perubahan dimensi internal administrasi publik seperti kebijakan, manajemen, organisasi, moral atau etika, dan kinerja dalam administrasi publik, dipengaruhi oleh dimensi eksternal yaitu lingkungan. Situasi lingkungan dapat dilihat dari sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya suatu negara yang sangat berpengaruh bagi administrasi publik. Oleh sebab itu, kemampuan mengenal dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan menjadi hal yang krusial.
6. Dimensi Akuntabilitas Kerja : Kebijakan, organisasi dan moral perlu dijalankan secara profesional serta harus menyesuaikan dengan lingkungan agar dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas yakni bahwa administrator yang telah dipercayakan sebagai pengembalian kepercayaan publik harus melayani publik dalam bentuk kerja. Dengan demikian dimensi terakhir dari administrasi publik adalah akuntabilitas kerja. Dimensi ini menggambarkan bukti nyata tentang kehadiran dan kegunaan riil dari administrasi publik dalam suatu negara.

Felix A. Nigro dan L. Loyd Nigro (1984:21) mendefenisikan Administrasi publik sebagai 1) Kerjasama kelompok di lingkungan pemerintahan, 2) Meliputi tiga cabang pemerintahan : legislatif, eksekutif, dan hubungan diantara ketiganya, 3) Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan sehingga merupakan sebagian dari proses politik, 4) Berkaitan erat dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan bagi masyarakat, dan 5) Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian administrasi perorangan.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan kelompok orang dalam lingkup pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menyangkut pelayanan kepada orang banyak dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu administrasi publik telah tumbuh menjadi sistem penyelenggaraan kebijakan publik dan semakin penting peranannya dalam proses kebijakan publik.

1.5.3 Kebijakan Publik

Istilah “Kebijakan” atau “*Policy*” sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari – hari. Menurut Jones dalam Winarno (2014:19), istilah kebijakan sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standard, proposal, dan grand design. Friederich pun memandang bahwa kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk

mencapai suatu tujuan atau sasaran atau merealisasikan maksud tertentu (Winarno, 2014 : 21). Maka dari itu, kebijakan dapat diartikan sebagai hasil dari tindakan pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan maupun sasaran tertentu.

Kata “publik” yang mengikuti kata kebijakan mengacu pada masyarakat secara luas, dalam artian kebijakan publik merujuk pada keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai wakil rakyat demi memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Beberapa literatur mengenai kebijakan publik memuat beberapa definisi kebijakan publik itu sendiri. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan politis untuk mengimplementasikan program dalam meraih tujuan demi masyarakat (Putra dalam Fermana, 2009 :38). Dalam membuat keputusan pada kebijakan publik tersebut dilakukan pengakomodasian tuntutan masyarakat kemudian pendelegasian kepada orang atau kelompok dalam model demokrasi perwakilan. Akan tetapi, cita-cita sosial dan tuntutan setiap individu dalam masyarakat berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh cara pandang individu terhadap preferensi individual, etika, kebebasan individu, hak individual, dan distribusi keadilan. Hal ini kerap mengakibatkan tabrakan kepentingan oleh delegasi yang dipilih untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (Winarno : 2014 :17). Definisi lain tentang kebijakan publik dikemukakan oleh Anderson dalam Winarno (2014 :23) yakni suatu arah tindakan yang ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor yang bermaksud mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Dalam hal ini maka

kebijakan publik diharapkan mampu memberikan dampak terhadap persoalan-persoalan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Menurut Anderson, konsep kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi (Winarno, 2014 : 23-24), yakni :

- a. Ketika membicarakan kebijakan publik, titik perhatian kita berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan.
- b. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dibuat oleh pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang tersendiri.
- c. Kebijakan berupa apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatur perdagangan, mempromosikan perumahan rakyat, mengendalikan inflasi dan bukan semata apa yang diinginkan oleh pemerintah.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif atau juga negatif.

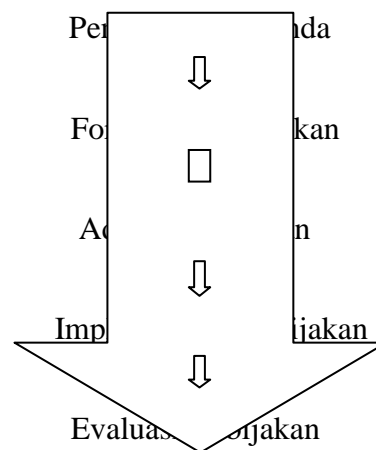
Berdasarkan beberapa pengertian mengenai kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang telah dibuat pemerintah yang bertujuan untuk hal yang lebih baik bagi masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat dan peningkatan kesehatan masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah yang dirumuskan menjadi sebuah kebijakan. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di setiap daerah merupakan salah satu kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah demi kemaslahatan masyarakat luas.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses kompleks yang melibatkan banyak variabel yang harus dikaji. Oleh sebab itu, beberapa ahli politik mengkaji dan membagi proses kebijakan publik kedalam beberapa tahap.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn dalam Winarno (2014 :35-37) antara lain penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*) dan evaluasi kebijakan (*policy assesment*).

Gambar 1.2

Tahap Kebijakan Publik



Sumber : Winarno (2014 : 36)

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat publik yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Masalah-masalah ini di pertimbangkan terlebih dahulu apakah benar-benar dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Ada masalah yang mungkin tidak disentuh, ada yang menjadi fokus pembahasan dan ada pula masalah yang ditunda dalam waktu lama karena alasan tertentu.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas dan dicari solusi pemecahannya oleh para pembuat kebijakan. Pemecahan masalah didapat dari berbagai pilihan atau alternatif kebijakan (*policy options/policy alternatives*). Proses perumusan kebijakan dilakukan dengan mencari alternatif pemecahan masalah terbaik yang diusulkan oleh aktor kebijakan.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Alternatif-alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan kemudian dipilih salah satu untuk diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai pilihan pemecahan masalah kemudian diimplementasikan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan kemudian dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya manusia dan finansial.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahap menilai sejauh mana kebijakan yang telah dijalankan mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai keberhasilan kebijakan.

Selain model di atas, juga terdapat model lain yakni model *policy making process* yang diungkapkan oleh Shafritz dan Russel dalam Keban (2008) terdiri atas :

1. *Agenda Setting*, tahap isu mulai diidentifikasi
2. Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan.
3. Implementasi
4. Evaluasi program analisis dan dampak
5. *Feedback*

Berdasarkan model tahapan kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa proses kebijakan publik setidaknya mencakup tahap-tahap antara lain Formulasi/perumusan kebijakan termasuk di dalamnya proses *agenda setting*, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan

1.5.4 Evaluasi Kebijakan Publik

1.5.4.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut Tyler, evaluasi dapat diartikan sebagai proses penentuan sejauh mana sebuah tujuan dapat dicapai, menyediakan informasi untuk membuat keputusan (Cronbach, 1963) dan melihat perbedaan apa yang ada antara kenyataan dengan standar yang sudah ditentukan (Malcolm, 1971) dalam Tayibnapsis (2008 : 3). Salah satu kriteria penting evaluasi adalah seberapa jauh sudah terwujud pencapaian tujuan. Kriteria lainnya adalah identifikasi kebutuhan dari klien yang potensial, nilai-nilai sosial, mutu dan efisiensi dibandingkan dengan objek-objek

alternatif lainnya. Kriteria yang dipakai untuk menilai objek tertentu hendaknya ditentukan dalam konteks dalam konteks objek tertentu.

Suatu kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah hendaknya perlu dievaluasi. Evaluasi dilakukan karena tidak semua kebijakan publik dapat memperoleh hasil atau dampak yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Lester dan Stewart (2000), dalam Winarno (2014: 226) mengemukakan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Hal ini berarti, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Winarno (2014: 226) mengungkapkan bahwa “evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan”.

Dunn (dalam Riant, 2008:473), mengemukakan bahwa “istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya”. Lebih lanjut, Dunn mengemukakan bahwa dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui empat aspek, sebagaimana dikemukakan oleh Wibawa (1994: 9-10) yaitu: Aspek proses pembuatan kebijakan, aspek proses

implementasi, aspek konsekuensi kebijakan dan aspek efektifitas dampak kebijakan. Keempat aspek pengamatan ini dapat mendorong seorang evaluator untuk secara khusus mengevaluasi isi kebijakan, baik pada dimensi hukum dan terutama kelogisannya dalam mencapai tujuan, maupun konteks kebijakan, kondisi lingkungan yang mempengaruhi seluruh proses kebijakan. Lebih lanjut, evaluasi terhadap aspek kedua disebut sebagai evaluasi implementasi, sedangkan evaluasi terhadap aspek ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai evaluasi kebijakan publik dapat dipahami bahwa evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah. Evaluasi kebijakan publik perlu dilakukan untuk melihat apakah program tersebut meraih hasil yang diinginkan dan sudah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan atau belum. Terdapat empat aspek yang menjadi konsentrasi evaluasi dan penelitian ini menaruh fokus pada aspek kedua yakni evaluasi terhadap proses implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Balaikota Semarang.

1.5.4.2 Tujuan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan memiliki beberapa tujuan yang dapat di rinci sebagai berikut (Subarsono, 2013 :120-121)

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan dalam artian mengetahui derajat capaian tujuan dan sasaran kebijakan
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, berarti mencari tahu berapa biaya dan manfaat yang dihasilkan suatu kebijakan.

- c. Mengukur seberapa besar keluaran (*outcome*) suatu kebijakan dan tingkat kualitas dari keluarannya itu sendiri.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan, apakah kebijakan yang dibuat berdampak positif atau tidak.
- e. Melihat apakah ada penyimpangan yang mungkin terjadi yakni dengan cara membandingkan antara sasaran dan tujuan dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan (*input*) bagi kebijakan yang baru, agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik dari hasil evaluasi.

Menurut Nugroho (2014 : 261) tujuan evaluasi tidak boleh hanya tentang “menemukan kesalahan” dan “siapa yang membuat salah” dan oleh karenanya menggantung kesalahan-kesalahan ini di kertas untuk dinilai secara politis. Tujuan utama evaluasi kebijakan adalah untuk menilai kesenjangan atau perbedaan antara harapan dan kenyataan. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Balaikota Semarang bertujuan untuk mengetahui derajat capaian tujuan dan sasaran kebijakan yang tercantum dalam Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2013.

1.5.4.3 Tipe Evaluasi Kebijakan

Islamy dalam Suwitri (2008:91) mengemukakan jenis evaluasi kebijakan berdasarkan proses sebagai berikut :

Tabel 1.3

Jenis Evaluasi Menurut Islamy

<i>Policy Evaluation</i>		
<i>Formulation</i>	<i>Implementation</i>	<i>Result/Impact</i>
<i>Ex-Ante</i>	<i>On-Going</i>	<i>Ex-Post</i>

Sumber : Sri Suwitri (2008)

1. Evaluasi *ex-ante* adalah evaluasi formulasi kebijakan, memilih alternatif untuk mengantisipasi dampak positif dan negatif serta konsekuensi bagi pelaksana kebijakan maupun penerima manfaat.
2. Evaluasi *On-Going* pada dasarnya berusaha melihat implementasi program atau kebijakan, sekalipun yang dilihat adalah prosesnya evaluasi ini tidak terlepas dari *input* dan *output*.
3. Evaluasi *ex-post* merupakan evaluasi dampak yang sasarannya sama dengan evaluasi on-going serta juga tidak terlepas dari *input-output*. Hal yang membedakan keduanya adalah evaluasi *on-going* mengamati pada jangka pendek sementara *ex-post* mengamati pada jangka panjang hingga kebijakan selesai dilakukan.

Menurut William Dunn, evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaannya dapat dibagi menjadi 3 bagian yakni :

- a. Evaluasi sebelum pelaksanaan kebijakan (evaluasi summative)
- b. Evaluasi pada saat kebijakan/program dilaksanakan (evaluasi proses) dan
- c. Evaluasi setelah kebijakan (evaluasi konsekuensi atau dampak kebijakan)

Anderson mengklasifikasikan evaluasi kebijakan ke dalam 3 tipe (Winarno, 2014 : 230-233) :

- a. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional yang dipandang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
- b. Tipe kedua, merupakan tipe evaluasi yang menaruh fokus pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Sehingga tipe evaluasi ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti : Apakah program dilaksanakan sebagaimana mestinya? Siapa penerima manfaat? Berapa jumlah biaya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur sudah diikuti?
- c. Tipe ketiga, evaluasi kebijakan berbentuk sistematis. Evaluasi ini melihat secara obyektif program kebijakan yang dijalankan dan mengukur dampaknya bagi masyarakat.

Tabel 1.4

Tipe Evaluasi Menurut Beberapa Ahli

No.	Tipe Evaluasi Menurut Islamy	Tipe Evaluasi Menurut Dunn	Tipe Evaluasi Menurut Anderson
1.	Ex-Ante	Evaluasi Summative	Evaluasi sebagai kegiatan fungsional
2.	On-Going	Evaluasi proses/pelaksanaan kebijakan	Evaluasi yang menaruh fokus pada bekerjanya kebijakan

3.	Ex-Post	Evaluasi konsekuensi/dampak kebijakan	Evaluasi yang mengukur dampak suatu kebijakan.
----	---------	---	--

Sumber : Diolah oleh Penulis

Berdasarkan kajian teori yang termuat sebelumnya tentang tipe evaluasi kebijakan menurut tiga ahli, penelitian ini berada pada tipe kedua evaluasi yakni evaluasi yang dilakukan pada saat implementasi kebijakan atau saat kebijakan sedang berjalan (*on-going*) di Balaikota Semarang. Evaluasi *on going* dipilih karena hingga saat penelitian ini dilakukan Perda No.3 Tahun 2013 masih berlaku di Kota Semarang dan implementasinya di Balaikota akan menjadi fokus evaluasi. Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibutuhkan variabel-variabel implementasi untuk menemukan faktor kendala dalam pelaksanaan kebijakan.

Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Nugroho, 2014) mengembangkan model implementasi kebijakan klasik. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan sejalan dengan proses kebijakan. Beberapa variabel kritis implementasi kebijakan adalah sumber daya dan tujuan standar, yang mendorong ke komunikasi antar organisasi dan penegakan aktivitas, karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik, yang pada gilirannya membangkitkan watak pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan.

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 142) dijelaskan sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kinerja

Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan budaya sosial yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan pada level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik pada level yang dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya Keberhasilan

Proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana Pusat

Perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/Kecendrungan (disposition)

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Karena itu lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif juga perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan.

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Daya Keberhasilan, Sikap/Kecenderungan (disposition), Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana untuk menggambarkan kendala yang ada dalam Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

1.5.4.4 Indikator Evaluasi Kebijakan

Keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur melalui beberapa indikator, karena penggunaan indikator tunggal akan sangat tidak efektif. Dalam artian penilaian yang dibuat dapat bias dari sesungguhnya.

Menurut Brigman & Davis (2000:130) terdapat empat indikator pokok evaluasi kebijakan publik yakni :

1. Indikator *Input*
2. Indikator Proses
3. Indikator *Output* dan
4. Indikator Outcomes

Adapun penjelasan dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indikator *input* (masukan) memfokuskan pada penilaian sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan berupa sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana kebijakan di wujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini menyangkut aspek efektivitas dan efisiensi dari metode yang dipakai dalam merealisasikan kebijakan publik yang ada.
3. Indikator *output* (hasil) menilai pada hasil atau produk yang dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil dapat berupa kuantitas orang yang berhasil mengikuti dan menerapkan kebijakan publik tertentu.

4. Indikator *outcomes* (dampak) menilai seberapa besar dampak yang diterima oleh masyarakat.

Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (Subarsono, 2013 : 126), mencakup lima indikator sebagai berikut.

1. Efektivitas

Pada dasarnya untuk menentukan keberhasilan suatu program kegiatan yang dilaksanakan tidak terlepas dari kata efektivitas, karena efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, misalnya jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

2. Kecukupan

Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan melihat atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

3. Pemerataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) sehubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-

kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.

4. Responsivitas

Responsivitas berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

5. Ketepatan

Dunn (2003:438) menyatakan bahwa ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasional substantif, karena pertanyaan tentang kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Rasional substantif menurut Dunn (2003:417) adalah merupakan karakteristik pilihan yang bernalar menyangkut perbandingan berbagai bentuk

kelayakan teknis, ekonomis, politik dan administrasi dengan maksud agar dapat dibuat pilihan yang paling layak dibawah kondisi yang ada.

- a. Kelayakan teknis berkenaan dengan apakah alternatif yang dipilih dapat mengatasi persoalan yang muncul di masyarakat.
- b. Kemungkinan ekonomi dan finansial berkenaan dengan pencapaian tujuan dengan biaya minimal.
- c. Kelayakan politik berkenaan dengan apakah aktor politik (pembuat keputusan) dan masyarakat (penerima kebijakan) dapat menerima alternatif kebijakan. Aktor politik mampu menerima alternatif yang dipilih, melalui pertimbangan bahwa kebijakan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Kemudian, kemampuan masyarakat menerima kebijakan, melalui pertimbangan manfaat yang dirasakan dan kebijakan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
- d. Kelayakan administrasi berkenaan dengan kemampuan dan komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan ketepatan adalah apakah kebijakan sudah memenuhi parameter kelayakan berdasarkan tujuan yang rasionalitas substantif.

Tabel 1.5

Indikator Evaluasi Kebijakan

No	Indikator	Penjelasan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai atau

		belum?
2	Kecukupan	Seberapa mampu hasil yang telah dicapai dapat memecahkan masalah?
3	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat terdistribusi secara merata kepada setiap kelompok masyarakat?
4	Responsivitas	Seberapa mampu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai dari berbagai kelompok?
5	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Sumber : Subarsono, 2013:126

Sementara itu, Langbein (Subarsono,2013 :126) mengemukakan indikator atau kriteria evaluasi kebijakan publik antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi
 - a. Peningkatan produktivitas sumber daya
 - b. Peningkatan efisiensi ekonomi
2. Distribusi Keadilan
 - a. Seberapa jauh prefensi kecukupan
 - b. Keadilan Horizontal
 - c. Keadilan Vertikal
3. Prefensi Warga Negara
 - a. Kepuasan Warga negara atau penerima manfaat
 - b. Seberapa jauh prefensi masyarakat dimuat dalam kebijakan publik

Berdasarkan kajian teori tentang indikator yang digunakan dalam mengevaluasi suatu kebijakan publik, penelitian Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Balaikota Semarang akan berfokus pada tiga indikator dari beberapa indikator evaluasi yang sudah dipaparkan. Adapun tiga indikator pokok yang dirasa paling tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yakni Efektivitas, Responsivitas dan Ketepatan. Dimana ketiga indikator ini mampu memberikan penilaian terhadap evaluasi yang akan dilaksanakan secara lebih mengerucut dan mendalam. Hal ini disebabkan oleh ruang lingkup penelitian yakni Balaikota Semarang yang hanya merupakan salah satu dari total tujuh kawasan yang ditetapkan dalam Perda.

Kriteria pertama, dilihat dari kedudukan efektivitas sebagai kunci dari pencapaian pelaksanaan kebijakan terhadap tujuan kebijakan. Selanjutnya, responsivitas dipilih dikarenakan keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah kebijakan yang mendapat respon yang baik dari kelompok sasaran. Dan kriteria terakhir dipilih untuk menjawab apakah alternatif kebijakan sudah memenuhi parameter kelayakan tujuan yang rasional substantif.

Kerangka Pikir Pemilihan Indikator

Brigman & Davis

1. Indikator *Input*
 - a. Sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar.
 - b. SDM, uang, infrastruktur pendukung
2. Indikator *Process*
 - a. Transformasi kebijakan dalam bentuk pelayanan langsung.
 - b. Efektivitas dan efisiensi.
3. Indikator *Output*
 - a. Hasil
 - b. Tingkat keberhasilan suatu kebijakan (kuantitas orang yang mengikuti)

William Dunn :

- a. Efektivitas
- b. Kecukupan
- c. Pemerataan
- d. Responsivitas
- e. Ketepatan

Langbein :

1. Pertumbuhan Ekonomi
 - a. Peningkatan Produktivitas Sumber daya.
 - b. Peningkatan efisiensi ekonomi
2. Distribusi Keadilan
 - a. Kecukupan
 - b. Keadilan vertical
 - c. Keadilan horizontal
3. Prefensi Warga Negara
 - a. Kepuasan warganegara
 - b. Seberapa jauh prefensi masyarakat termuat dalam Kebijakan publik.

1. Efektivitas
2. Responsivitas
3. Ketepatan

INDIKATOR
EVALUASI
KEBIJAKAN

Tabel 1.6
Indikator Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR) di Balaikota Semarang

No.	Kriteria	Penjabaran tujuan sesuai kriteria	Ukuran
1	Efektivitas	Kebijakan mencapai hasil yang diharapkan / mencapai tujuan kebijakan.	<p>Dikatakan efektif apabila sudah mencapai tujuan yang termuat dalam Perda No. 3 Tahun 2013, tujuan tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung; c. Menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; dan d. Melarang /menghilangkan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di Kawasan Tanpa Rokok
2.	Responsivitas	Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok masyarakat.	<p>Dikatakan responsif apabila hasil dari kebijakan telah memenuhi preferensi sasaran kebijakan KTR di Balaikota yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - masyarakat bukan perokok - masyarakat perokok aktif yang ada di Balaikota.

3.	Ketepatan	Seberapa jauh kebijakan sudah memenuhi parameter kelayakan berdasarkan tujuan yang rasional substantif.	<p>Dikatakan tepat apabila tujuan kebijakan sudah memenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kelayakan teknis : mengatasi persoalan pelanggaran KTR di Balaikota - kelayakan politik : dapat diterima aktor kebijakan dan masyarakat sasaran kebijakan - kelayakan administrasi : pelaksana kebijakan mampu dan berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan KTR.
----	-----------	---	---

Sumber : Subarsono, 2013:126 – diolah oleh penulis

1.6 Konsep Kawasan Tanpa Rokok

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kawasan */ka-wa-san/n merupakan* daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dan sebagainya. Menurut Perda No. 3 Tahun 2013 Kota Semarang Kawasan Tanpa Rokok atau disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.

Sesuai dengan pengertian kawasan secara harfiah, Kawasan Tanpa Rokok memiliki ciri tertentu yang tertuang dalam Perda yakni antara lain :

A. Merupakan area yang terdiri dari :

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan : suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat

- b. Tempat Proses Belajar Mengajar : gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
- c. Tempat Anak Bermain : area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak
- d. Tempat Ibadah : bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
- e. Angkutan Umum : alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya biasanya dengan kompensasi.
- f. Tempat Kerja : tiap ruangan atau lapangan tertutup ,bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
- g. Tempat Umum : semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- h. Tempat Lainnya : tempat tempat tertentu yang belum masuk dalam aturan namun kemudian ditetapkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok.

- B.** Terdapat pengumuman dan/atau tanda larangan wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- C.** Pada tempat-tempat yang telah ditentukan larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tersebut
- D.** Pada tempat-tempat yang ditentukan terdapat Tempat Khusus Merokok dengan ketentuan:
 - a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Kawasan Tanpa Rokok di Balaikota Semarang merupakan area yang dilarang untuk melakukan aktivitas merokok, kegiatan produksi, penjualan dan mempromosikan produk rokok di Balaikota Semarang. Area ini meliputi ruang kerja dan keseluruhan gedung dengan batas terluar adalah gerbang masuk dan gerbang keluar sesuai dengan yang sudah diatur dalam Perda No.3 Tahun 2013.

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Balaikota Semarang merupakan upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari di Balaikota Semarang baik ASN maupun masyarakat yang berkeperluan urusan administrasi agar dapat terhindar dari bahaya asap rokok dan lingkungan yang tercemar asap rokok. Penerapannya di Balaikota Semarang

dilakukan di lingkungan gedung termasuk ruang kerja hingga batas terluar yang sudah ditetapkan dalam Perda No. 3 Tahun 2013.

1.8 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian berisi poin-poin mengenai aspek-aspek apa saja yang akan digali oleh peneliti dalam menggambarkan fenomena yang terjadi terkait dengan masalah penelitian. Fenomena yang akan diamati dalam penelitian Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Balaikota Semarang adalah sebagai berikut :

a. **Efektivitas**, gejala-gejala yang diamati

Capaian tujuan yang diperoleh dari proses pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2013 antara lain :

- a. terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. terwujudnya perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. terciptanya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; dan
- d. hilangnya kegiatan berupa penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di Kawasan Tanpa Rokok.

b. **Responsivitas**, gejala-gejala yang diamati

Daya tanggap pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sasaran penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Balaikota Semarang meliputi :

- Hak masyarakat bukan perokok (perokok pasif) akan udara dan lingkungan yang bersih terpenuhi;
- Hak perokok aktif untuk dapat tetap merokok di tempat atau ruangan yang dibuat khusus untuk merokok terpenuhi.

c. **Ketepatan**, gejala-gejala yang diamati

Kesesuaian capaian tujuan kebijakan dengan parameter kelayakan berdasarkan tujuan yang rasional substantif.

- kelayakan teknis : mengatasi persoalan pelanggaran KTR di Balaikota
- kelayakan politik : dapat diterima aktor kebijakan dan masyarakat sasaran kebijakan
- kelayakan administrasi : pelaksana kebijakan mampu dan berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan KTR

2. Faktor Penghambat

Gejala yang diamati adalah faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Balaikota Semarang antara lain :

- Sikap/Kecenderungan masyarakat perokok aktif dalam pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

- Sumber Daya Keberhasilan berupa sumberdaya manusia tim penegakan pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
- Komunikasi antara organisasi/instansi di Balikpapan Semarang dengan pelaksana Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dalam penyediaan Tempat Khusus Merokok

1.9 Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Desain penelitian kualitatif bersifat umum, berubah-ubah dan berkembang sesuai dengan situasi yang ada dilapangan, desain ini hanya digunakan sebagai asumsi untuk melakukan penelitian. Nasution 1992 (dalam Andi Prastowo 2012:41) berpandangan bahwa dalam metode ini pada awalnya desain penelitian belum dapat dirancang secara terperinci, lengkap dan pasti, yang menjadi pegangan selanjutnya dalam penelitian. Oleh karena itu, belum ada langkah-langkah yang jelas, yang dapat diikuti dari awal sampai akhir layaknya penelitian kuantitatif. Data yang terkumpul dalam penelitian ini berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Apabila terdapat angka-angka bersifat sebagai pendukung atau penunjang.

1.9.1 Desain Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian adalah untuk membantu seorang peneliti memberikan penafsiran terhadap suatu permasalahan agar penulisan mengarah pada permasalahan yang tidak menyimpang dari tujuan semula. Tipe penelitian ada tiga macam, yakni:

a. Penelitian Eksploratif

Penelitian yang bertujuan memperdalam, menelusuri atau menggali tentang gejala tertentu untuk merumuskan masalah, fenomena atau gejala yang belum pernah diketahui dan dirasakan secara lebih terperinci.

b. Penelitian Eksplanatif

Penelitian yang dilakukan demi menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi dan hasil dari penelitian ini ialah hubungan sebab akibat.

c. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial tertentu dengan cara membandingkan gejala yang ditemukan secara lebih terperinci. Hasil dari penelitian ini berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini belum ada hipotesis, tetapi sudah ada analisa yang belum mendalam.

Berdasarkan jenis penelitian yang telah dikemukakan tersebut diatas, peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan demikian data yang terkumpul akan diolah menjadi berbentuk kata-kata, gambar dan bukan

angka. Apabila terdapat angka-angka bertujuan sebagai penunjang data dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci mengenai keadaan obyek dan subyek pengamatan.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs berkaitan dengan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini memiliki fokus dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

Peneliti memilih lokasi penelitian di Balaikota Kota Semarang untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang ada di tempat kerja khususnya di lingkungan Gedung Pemerintahan. Tempat penelitian yang telah ditentukan bermaksud untuk mempersempit lingkup penelitian sehingga mempertajam fenomena yang memperjelas kesenjangan antara pelaksanaan kebijakan yang sebagaimana mestinya dengan yang terjadi di lapangan.

1.9.3 Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif memiliki beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk kepada subjek penelitian. Terdapat istilah informan yakni pihak yang memberikan informasi tentang suatu kelompok atau entitas tertentu. Informan bukan diharapkan menjadi representasi dari entitas yang ada. Istilah lain adalah partisipan yang digunakan apabila subjek-subjek mewakili suatu kelompok tertentu dan hubungan antara peneliti

dengan subjek penelitian dianggap bermakna bagi subjek. Secara substansial, kedua istilah ini dianggap sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2007 : 132). Peneliti membutuhkan informan untuk membantu agar secepatnya dengan tetap seteliti mungkin dapat menambahkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti.

Penelitian ini membutuhkan beberapa informan untuk menjadi narasumber yang dapat dipercaya yang mempunyai pandangan dan wawasan yang luas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Balaikota Semarang. Dalam penelitian ini jumlah informan yang dibutuhkan tidak dapat ditetapkan sejak awal dalam pembuatan rancangan penelitian. Dengan demikian jumlah informan dalam penelitian ini dapat lebih sedikit atau lebih banyak sesuai kondisi yang ada di lapangan. Informan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

- a) Dinas Kesehatan Kota Semarang, sebagai penganggung jawab dalam sosialisasi KTR dan termasuk dalam tim penegakan Perda KTR
- b) Satpol PP Kota Semarang, sebagai penganggung jawab dalam penegakan Perda KTR
- c) Kepala Sub Bagian Perancangan Produk Hukum, Pengaturan dan Dokumentasi Bagian Hukum, Setda Kota Semarang, sebagai salah satu penyusun dan perancang Perda KTR

- d) Kepala sub bidang Sosial Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang, sebagai penanggung jawab sosialisasi perda KTR
- e) Para ASN yang bekerja di Balaikota Semarang, sebagai sasaran kebijakan KTR yang terdiri dari ASN perokok aktif dan ASN bukan perokok
- f) Masyarakat yang berkunjung ke Balaikota Semarang, sebagai sasaran kebijakan KTR baik perokok aktif maupun bukan perokok

1.9.4 Teknik Pemilihan Informan

Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam sebuah penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2012:52) adalah dengan cara peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Orang yang menjadi sumber data ditentukan secara purposive, yakni dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. dan akan dikembangkan melalui teknik *snowballing* yakni pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Sementara, hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut.

Cara yang bisa digunakan untuk mendapatkan informan dalam penelitian ini penulis memiliki dua langkah yaitu :

1. Melalui keterangan orang yang berwenang

Cara ini bisa dilakukan dengan formal (pemerintah) maupun informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin adat dan lain sebagainya)

2. Melalui wawancara pendahuluan

Di dalam penelitian, informan berkedudukan sangat penting bagi peneliti. Terdapat persyaratan tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk layak ditetapkan sebagai informan peneliti. Moleong 2007 (dalam Andi Prastowo 2012;1960 menyebutkan bahwa terdapat 5 persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang agar layak dijadikan informan yaitu:

- a. Orang tersebut harus jujur dan dapat dipercaya
- b. Memiliki kepatuhan terhadap peraturan
- c. Orang tersebut suka bicara, bukan orang yang sukar bicara apalagi pendiam
- d. Tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertikai dalam latar penelitian
- e. Orang yang memiliki pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi

Dalam wawancara ini, peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang telah diuraikan diatas.

1.9.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa teks, kata-kata, foto dan sebagian berupa angka. Adapun sumber data yang digunakan untuk membantu penelitian ini yakni berupa :

a. Data Primer

Data primer adalah responden, dimana peneliti dapat memperoleh data secara langsung dari sumbernya. Sumber dari data primer dalam penelitian kualitatif adalah wawancara secara mendalam (indepth interview) terhadap informan dan observasi langsung ke objek penelitian. Informan Kunci atau narasumber utama dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Kesehatan Kota Semarang
2. Satpol PP Kota Semarang
3. Kepala sub bidang Sosial Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang
4. Para ASN yang bekerja di Balaikota Semarang
5. Masyarakat yang berkunjung ke Balaikota Semarang

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersifat mendukung pembahasan. Data ini diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian yang sudah ada. Data ini dapat berupa data

dokumentasi, laporan-laporan, majalah, buku, jurnal dan sumber lain yang relevan.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan satu dari komponen riset yang berarti tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan digunakan dalam riset haruslah benar, karena ketika data salah akan menghasilkan informasi yang salah pula. Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, dan merupakan cara yang mudah, tepat, juga sistematis karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Pada dasarnya dalam penelitian terdapat banyak teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, namun hanya digunakan beberapa saja dalam upaya mengumpulkan data yang relevan maka cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara dilakukan secara *face to face* atau tatap muka terhadap responden, hal ini dimaksudkan untuk mencari informasi atau fakta-fakta yang belum terungkap sehingga suatu fenomena sosial dapat dipahami. Mendapatkan informasi melalui tanya jawab langsung terhadap pihak atau orang yang sengaja dipilih dimaksudkan agar mendapat informasi yang diperlukan dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- b. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data setiap bahan tertulis. Secara mendasar dokumen sebagai sumber data yang dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan atau bahkan meramalkan. Dokumen yang dimanfaatkan dapat dapat berasal dari mana saja

sepanjang berhubungan dengan fokus penelitian, berupa arsip – arsip dan laporan pada pemerintah.

- c. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan pengamatan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat dan terdengar mengenai objek yang diteliti.
- d. Studi Pustaka, teknik ini dilakukan dengan cara pencarian informasi dari literatur dan buku-buku yang relevan dengan penelitian.

1.9.7 Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdapat 3 tahapan sebagai berikut :

- a. Editing. Pada tahapan ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil, dan catatan-catatan lainnya. Tujuan dari editing ini adalah memperhalus data selanjutnya dengan cara perbaikan kalimat dan kata, memberi keterangan tambahan, membuang keterangan yang berulang dan tidak penting dan menerjemahkan ungkapan atau istilah setempat ke Bahasa Indonesia.
- b. Klasifikasi. Dalam tahapan ini peneliti mencoba menggolong-golongkan jawaban dan data lainnya menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu seperti yang ditetapkan sebelumnya. Pengelompokan ini sama dengan menumpuk-numpuk data sehingga akan mendapat tempat di dalam kerangka (*outline*) laporan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- c. Memberi kode (coding). Tahapan ini melakukan pencatatan judul singkat menurut indikator dan variabelnya serta memberi catatan tambahan yang dianggap perlu dan dibutuhkan. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memudahkan peneliti menemukan makna tertentu dari setiap tumpukan data serta mudah menempatkannya di dalam *outline* laporan.

1.9.8 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan interpretasikan. Moleong 2007 (dalam Andi Prastowo 2012 : 238) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis domain. Analisis domain adalah langkah analisis pertama yang dilakukan setelah melalui proses terjun ke objek penelitian yang berupa situasi sosial (*place*, *actor*, dan *activity*). Analisis ini pada umumnya dilaksanakan untuk memperoleh gambaran umum secara menyeluruh tentang situasi sosial (objek penelitian) yang diteliti.

Teknik untuk mendapatkan datanya adalah dengan *grand tour* dan *mini tour question* . Hasilnya berupa gambaran umum yang belum pernah diketahui sebelumnya tentang objek yang diteliti. Selanjutnya domain yang dipilih oleh peneliti ditetapkan sebagai fokus penelitian yang perlu diperdalam melalui pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi

banyak. Oleh karena itu diperlukan analisis lagi yang disebut dengan analisis taksonomi. Singkatnya dalam penelitian ini, proses analaisis yang digunakan adalah analisis model interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles & (Huberman 1992: 53),:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang diperoleh melalui catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam hal ini data yang diperoleh di lapangan disusun berdasarkan hal-hal yang pokok dan berhubungan dengan pokok masalah. Setelah itu, laporan direduksi, dirangkum, dipilah hal yang pokok, dan difokuskan kepada hal-hal yang penting dan dicari tema atau polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi terusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan asas pemahaman yang didapatkan dari penyajian-penyajian tersebut. Tampilan data (*data display*) dipergunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan

dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

1.9.9 Kualitas Data

Ada beberapa macam uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektivitas) dalam Sugiyono 2012 : 270

1. Kredibilitas

Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif yang kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Karena dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Kredibilitas dapat dilakukan dengan pengamatan yang berkelanjutan pada saat wawancara, observasi dan menggunakan bahan-bahan referensi.

2. Transferabilitas

Transferabilitas merujuk kepada tingkat kemampuan hasil dari penelitian kualitatif untuk dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks atau setting yang lain. Transferabilitas jika dilihat dari perspektif kualitatif merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi.

Peneliti kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Pihak yang ingin mentransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang bagaimana transfer tersebut masuk akal.

3. Dependabilitas

Dependabilitas merujuk pada perlunya peneliti dalam memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setting dan bagaimana perubahan-perubahan itu dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut.